

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki suatu kebijakan luar negeri yang berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya yang tidak terlepas dari pengaruh sejarah dan ideologi negara yang dianut oleh masing-masing negara. Kebijakan luar negeri dibentuk untuk melindungi kepentingan nasional yang dimiliki oleh suatu negara, tujuan ideologis, keamanan nasional, dan kesejahteraan ekonomi di suatu negara. Dalam menyesuaikan kebijakan luar negeri terhadap kondisi dan situasi internasional suatu negara harus tetap berpedoman pada landasan negara dan politik luar negerinya. Dirumuskannya kebijakan politik luar negeri tentu perlu adanya pertimbangan baik faktor dalam negeri maupun faktor luar negeri agar kebijakan yang dirumuskan dapat mewujudkan kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa ada keterkaitan yang erat antara situasi dalam negeri dengan politik luar negeri. (Bandoro, 2005)

Indonesia sebagai negara kepulauan telah menetapkan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) melalui *International Maritime Organization* yang disepakati sejak tahun 1998, potensi Indonesia sebagai negara yang memiliki letak strategis dalam segi geografis dan geopolitik menjadikan Indonesia sebagai jalur komunikasi internasional yang menghubungkan kepentingan negara lain. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya laut yang tersebar di seluruh wilayah perairannya dan menjadi keuntungan bagi Indonesia sebagai poros maritim dunia (P, 2016).

Terpilihnya Presiden Joko Widodo sebagai presiden ke tujuh negara Indonesia telah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama. Berbagai proyek infrastruktur di berbagai

bidang terus dioptimalkan dan gencar dilaksanakan untuk meningkatkan konektivitas. Adapun beberapa bidang dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan infrastruktur darat yakni pembangunan jalan, pembangunan rel kereta api, pembangunan bandara udara, pembangunan infrastruktur maritim yakni pembangunan pelabuhan, pembangunan tol laut, pembangunan industri galangan kapal; pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan yakni pembangunan bendungan, pembangunan embung, dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi (Kompas.com, 2018). Guna memperlancar pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, Presiden Joko Widodo menjalin kerja sama dengan beberapa negara untuk memperoleh investasi yang mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti kerja sama dengan negara Amerika, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Tiongkok, Australia, dan Hongkong (Statistik, Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Negara(Juta US \$), 2015-2017, 2017).

Di awal masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah mengubah arah pembangunan Indonesia yang semula berorientasi daratan menjadi laut dengan visi menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia (Perwita, 2015). Ide-ide pemikiran Presiden Joko Widodo terkait dengan visi poros maritim dunia tersebut didasarkan pada pembangunan ekonomi Indonesia yang masih memprioritaskan pada eksplorasi dan pengolahan wilayah daratan, padahal Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. Presiden Joko Widodo menjadikan poros maritim dunia sebagai arah kebijakan luar negerinya dalam kerja sama dengan negara lain. Kebijakan tersebut telah dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Forum East Asian

Summit (EAS). Berdasarkan kebijakan ini, maka agenda-agenda pembangunan akan difokuskan pada lima pilar utama dalam konsep poros maritim dunia. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan poros maritim dunia merupakan kebijakan luar negeri Indonesia saat ini (Pujayanti, 2015).

Melalui penjelasan tentang agenda poros maritim dunia di beberapa kesempatan dalam kunjungan Indonesia ke mancanegara, kebijakan poros maritim Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ini memperoleh respon dari banyak negara baik negara dalam kawasan maupun negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Australia, dan Korea Selatan. Sebagian besar negara-negara tersebut secara terbuka menunjukkan keinginan dan ketertarikan yang tinggi untuk dapat berinvestasi di sektor maritim, dengan jumlah total investasi mencapai 9,34 miliar dolar AS (Nainggolan, p. 175).

Jepang sebagai salah satu negara terbesar yang menanamkan investasinya di Indonesia memberikan responnya terhadap kebijakan poros maritim dunia. Hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin erat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya undangan pertemuan dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kepada Presiden Indonesia Joko Widodo pada tanggal 23 Maret 2015. Dalam pertemuan tersebut kedua negara menyatakan komitmennya untuk memperkuat mitra kerja sama strategis dalam bidang maritim dan demokrasi serta menegaskan adanya kepentingan bersama dalam mempertahankan serta mempromosikan perdamaian, dan menjaga kestabilan dan kesejahteraan secara regional dan global (Japan). Adapun beberapa kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam bidang maritim lebih difokuskan dengan membentuk *Indonesia-Jepang Maritime Forum (IJMF)* pada tahun 2016. Kerja sama ini

terbentuk ketika Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja ke Tokyo tanggal 20-21 Desember 2016 dan diakhiri dengan penandatanganan MoU (Indonesia).

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo telah membangun kerja sama maritim dengan Amerika Serikat sejak munculnya isu keamanan maritim di wilayah Asia Pasifik. Dalam upaya merealisasikan cita-cita poros maritim dunia, pemerintah Indonesia telah menandatangani kesepakatan dalam bentuk MoU kerja sama maritim dengan Amerika Serikat pada tanggal 24 Oktober 2015 guna meningkatkan kerja sama maritim (Jakarta, 2015). Kerja sama antara Indonesia dengan Amerika Serikat telah dirangkum dalam *Framework Arrangement on Cooperative Activities in the field of Defence between Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and Department of Defence of the United States of America* yang telah ditandatangani pada tahun 2010. Melalui Duta Besar Robert O'Blake dalam program *Indonesia-America Partnership for Maritime and Fisheries Vocational Education*, Amerika telah menyerahkan dana sebesar 33 juta dolar AS untuk membantu program kemaritiman Indonesia. Sebelum bantuan tersebut, pemerintah AS juga telah menyalurkan dana sebesar 35 juta dolar AS untuk program kemaritiman dan menyatakan kepeduliannya atas konservasi laut Indonesia (Simanjuntak, 2015).

Dalam konteks kepentingan nasional domestik, Indonesia mengalami tiga persoalan mendasar dalam kemaritiman Indonesia yakni ketimpangan agraria kelautan, kerentanan pencurian ikan, dan ketimpangan infrastruktur. Ketimpangan infrastruktur yang signifikan dimana 70% infrastruktur berada di bagian wilayah barat Indonesia, padahal kekayaan sumber daya laut juga terdapat di bagian wilayah timur Indonesia yang mengakibatkan terhambatnya keberlangsungan pelaksanaan aktivitas maritim. (Kompas.com, Tiga Masalah Mendasar Maritim Indonesia, 2014). Berdasarkan pertimbangan

terhadap persoalan-persoalan tersebut, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo lebih memprioritaskan kerja sama pembangunan infrastruktur maritim. Hal ini dikarenakan infrastruktur di Indonesia dinilai masih rendah dan belum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia meskipun kondisi infrastruktur Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Adapun beberapa kendala dalam infrastruktur maritim Indonesia terdapat pada sektor pelabuhan, sektor tol laut, dan sektor industri galangan kapal. Dalam upaya mengurangi kendala-kendala tersebut, selama ini Indonesia telah bekerja sama dengan beberapa negara seperti kerja sama Indonesia-Jerman dalam sektor industri galangan kapal, kerja sama Indonesia-Jepang dalam sektor tol laut dan sektor pelabuhan, serta kerja sama Indonesia-Belanda dalam sektor pelabuhan.

Namun sejak tahun 2015, untuk meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur maritim, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menjadikan Tiongkok sebagai mitra kerja sama dalam mengatasi masalah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan bilateral pada tahun 2015 antara Indonesia dan Tiongkok dalam upaya meningkatkan arus investasi Tiongkok khususnya dalam pembangunan infrastruktur maritim (Galih, 2015). Kedua negara juga sepakat untuk menyinergikan kebijakan tersebut dalam merealisasikan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur maritim. Adanya kesepakatan tersebut menjadikan Tiongkok memiliki posisi strategis bagi Indonesia dalam pembangunan infrastruktur di sektor maritim. Contohnya dari kerjasama ini terdapat beberapa perusahaan milik Tiongkok telah menandatangani MoU

dengan BUMN milik Indonesia untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur maritim Indonesia seperti proyek pelabuhan Tanjung Priok dengan total investasi sebesar US\$ 5,9 miliar (Cicilia, 2017), proyek pembangunan industri galangan kapal Karimun dengan total investasi sebesar US\$ 55 juta (Keprimedia, 2019), dan proyek pembangunan tol laut Bali Mandara dengan total investasi mencapai US\$ 51,930 miliar (Kontan, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan; maka penulis memilih judul **“Kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerja sama dengan Tiongkok pada pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia tahun 2014-2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

“Mengapa Presiden Joko Widodo bekerja sama dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur maritim Indonesia tahun 2014-2019?”

C. Kerangka Teoritik

Dalam menjawab pokok permasalahan tentang alasan kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang lebih memprioritaskan menjalin kerja sama pembangunan dalam bidang infrastruktur maritim dengan Tiongkok maka digunakan beberapa pendekatan yang relevan, yaitu, **Teori Pengambilan Kebijakan Luar negeri.**

Teori Pengambilan Kebijakan Luar negeri.

Teori pengambilan kebijakan luar negeri dapat menjelaskan tentang alasan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri oleh sebuah negara. Menurut William D. Coplin, politik luar negeri berisi sejumlah aktivitas yang dapat diklasifikasikan dalam tiga

macam, yaitu kebijakan umum, keputusan keputusan administratif, dan keputusan-keputusan kritis. Politik luar negeri yang bersifat umum terdiri atas serangkaian keputusan yang satu dengan lain nya hanya terkait secara tidak langsung. Politik luar negeri yang bersifat umum terdiri atas serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan-tindakan langsung. Keputusan-keputusan politik luar negeri yang bersifat administratif dibuat oleh para pejabat yang lebih rendah menyangkut kondisi-kondisi spesifik yang dibatasi oleh lingkup, ruang, dan waktunya. keputusan-keputusan politik luar negeri yang sifatnya krisis pada umumnya menyangkut tentang kondisi-kondisi khusus yang dalam konsekuensi jangka panjang para peserta merasa terancam, terbatas oleh waktu dan mengejutkan (Coplin, 2003, p. 32).

Teori pengambilan kebijakan luar negeri ini akan menjelaskan secara spesifik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh sebuah negara. Dalam bukunya, William D. Coplin menyatakan:

“Apabila kita mempertanyakan mengapa negara berperilaku seperti itu, maka perlu mempertanyakan pula mengapa para pemimpin negara membuat keputusan tersebut. tindakan politik tertentu dapat dipandang sebagai akibat yang ditimbulkan dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer; dan ketiga, konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dalam hubungan negara lain dalam konteks itu.” (Coplin, 2003, p. 30).



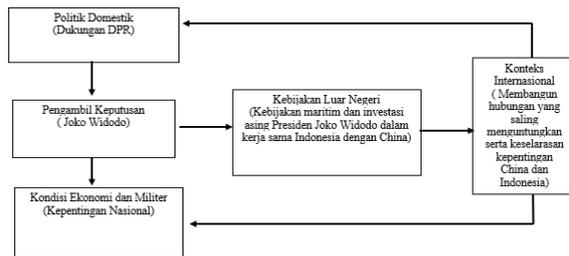
Gambar 1. 1Skema Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri

Sumber: William D. Coplin, hal.30

Berdasarkan gambar di atas dapat ditelaah bahwa, pengambilan keputusan luar negeri dalam konteks ini, presiden sebagai penanggung jawab dan sebagai aktor rasional akan mempertimbangkan politik dalam negeri, situasi ekonomi dan militer serta konteks internasional dalam merumuskan dan menciptakan kebijakan politik luar negerinya. Dengan demikian, kebijakan yang diambil suatu negara bukan keinginan pribadi dari pengambil keputusan, melainkan hasil yang diperoleh bersumber dan didasarkan pada pertimbangan terhadap tiga faktor tersebut.

Pembuat kebijakan sangat berkaitan dengan bagaimana pemimpin suatu negara dapat merespon serta mengelola isu-isu yang sedang berkembang. Perihal tersebut pada dasarnya mengarah pada bagaimana seseorang pemimpin dapat mempertahankan power yang dimilikinya dan mewujudkan berbagai macam aspirasi dalam memajukan situasi ekonomi dan politik terhadap interaksi politik luar negeri terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerja sama dengan negara-negara lain.

Adapun dalam penelitian ini, teori pengambilan keputusan luar negeri tepat untuk digunakan. Hal ini disebabkan teori tersebut dapat digunakan dalam menjelaskan alasan sebuah negara mengeluarkan sebuah kebijakan atau keputusan. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo sebagai pengambil keputusan mengeluarkan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerjasama pembangunan infrastruktur maritim dengan Tiongkok di era pemerintahannya tahun 2014-2019. Kebijakan ini akan dilihat dari tiga indikator pertimbangan yang ada dalam teori pengambilan keputusan luar negeri yaitu; a) Kondisi politik dalam negeri; b) kondisi ekonomi dan militer; c) Konteks internasional. Adapun implementasi tersebut adalah sebagai berikut;



Gambar 1. 2 Implementasi Teori dalam Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Presiden Joko Widodo dalam Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Maritim dengan Tiongkok

Kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional menjadi landasan terbentuknya hubungan internasional antara negara Indonesia dengan Tiongkok. Dalam memperjuangkan kepentingan nasional, politik luar negeri Indonesia menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan nasional secara keseluruhan (Inayati & Muna, 1998).

Dalam aspek politik domestik, kebijakan luar negeri menjadi sebuah hasil dari proses politik yang melibatkan banyak aktor dalam situasi tertentu. Politik dalam negeri lebih berfokus pada interaksi pembuat kebijakan dengan aktor-aktor politik yang berupaya untuk mempengaruhi politik luar negeri. Pembuat kebijakan dengan yang mempengaruhi kebijakan memiliki hubungan timbal balik dalam sistem pengaruh kebijakan. Presiden Joko Widodo menetapkan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menjadikan sektor kemaritiman menjadi elemen penting dalam upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia tersebut. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, pemerintah Indonesia memerlukan pembangunan dalam sektor kemaritiman yang pendanaannya berasal dari dana investasi asing yang disediakan oleh investor asing yang menanamkan investasinya di Indonesia. Tiongkok merupakan negara yang dipilih oleh Indonesia untuk bekerja sama dalam bidang kemaritiman karena Tiongkok mampu menyediakan dan menanamkan investasinya dalam jumlah yang besar.

Dalam aspek ekonomi dan militer kedua faktor merupakan dua hal yang berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan Suatu negara tidak dapat membangun perekonomian yang baik jika tidak ada pertahanan militer begitupun sebaliknya. Ekonomi dan militer menjadi hal penting yang diperlukan oleh suatu negara dalam menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Dalam aspek militer, kebijakan Indonesia Ini sesuai dengan salah satu pilar yang terdapat pada lima pilar utama Indonesia dalam konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia yakni membangun kekuatan pertahanan maritim. Kebijakan tersebut mendorong Indonesia untuk melakukan perluasan kerja sama pertahanan dengan negara Tiongkok dan berkomitmen dalam upaya perdamaian dan keamanan internasional. Kerja sama militer antara Indonesia dengan Tiongkok telah tertuang dalam

“Statement Bersama Kemitraan Strategis Komperhensif antara Indonesia dengan Tiongkok” (China, 2017).

Dalam aspek ekonomi, kebijakan Indonesia ini merupakan amunisi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tiongkok berperan penting dalam mendukung kemajuan ekonomi dan perdagangan serta pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan pendekatan dalam teori pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia maka ini berkaitan dengan kapasitas ekonomi yang dimiliki oleh Tiongkok. negara Tiongkok menjadi salah satu negara yang berinvestasi besar di Indonesia. Kontribusi Tiongkok mengalami peningkatan yang sangat tinggi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam bidang Infrastruktur tidak hanya dalam investasi tetapi juga melalui bantuan hutang. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia lebih memfokuskan dan memprioritaskan aliran dana yang diperoleh dari pihak asing untuk pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur di negara Indonesia mempertimbangkan anggaran pendapatan belanja negara Indonesia yang masih mengalami defisit.

Dalam aspek konteks internasional, kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok tidak terlepas dari pengaruh banyak faktor diantaranya yakni posisi geografis yang dimiliki oleh Indonesia, potensi sumber daya alam, faktor ekonomi, faktor politik, faktor pertahanan, dan berbagai hal yang terjadi di dunia internasional. Kepentingan nasional dan strategi Tiongkok untuk memperluas sektor ekonomi merupakan faktor internasional. Hal ini dapat dilihat dari sikap Tiongkok yang secara cenderung agresif dalam mempromosikan proyek besarnya yakni proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) kepada negara-negara yang akan dilalui oleh jalur BRI tersebut salah satunya yakni negara Indonesia.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang serta kerangka teori yang digunakan oleh penulis, maka diperoleh hipotesa Presiden Joko Widodo bekerja sama dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur maritim Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019 karena :

1. Kepentingan nasional Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,
2. Kondisi ekonomi Indonesia yang belum mampu memenuhi biaya dalam pembangunan infrastruktur maritim Indonesia sehingga memerlukan bantuan pendanaan yang bersumber dari Investasi asing
3. Kondisi militer Indonesia yang masih memerlukan perluasan kerja sama dengan Tiongkok sebagai bentuk pertimbangan terhadap kekuatan militer Tiongkok, dan
4. Kepentingan Tiongkok untuk membangun jalur sutera maritim baru melalui kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) dengan berbagai kemudahan dalam bentuk investasi dan bantuan pendanaan yang ditawarkan oleh Tiongkok terhadap pembangunan infrastruktur maritim Indonesia.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis. Penulis menjelaskan kerja sama maritim antara Indonesia-Tiongkok dan menganalisis hasil kerja sama tersebut dalam mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia serta menggambarkan bagaimana pengembangan politik luar negeri Indonesia menuju poros maritim dunia. Jenis data yang disajikan adalah data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen dan artikel yang dinilai sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif, yaitu penulis menganalisis data sekunder kemudian menggunakan teori dan konsep untuk menjelaskan suatu kejadian dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya yang dianggap memiliki hubungan saling keterkaitan dengan politik luar negeri Indonesia dalam kerja sama maritim di era pemerintahan Joko Widodo.

F. Batasan Penelitian

Dalam menganalisis alasan mengapa Indonesia menjalin kerja sama pembangunan infrastruktur maritim dengan Tiongkok di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, penulis membatasi pembahasan tersebut dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Dimana pada tahun tersebut merupakan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui alasan Presiden Joko Widodo menjalin kerja sama pembangunan infrastruktur maritim dengan Tiongkok di era pemerintahannya tahun 2014-2019 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Presiden Joko Widodo dalam mengambil kebijakan luar negeri Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, kerangka berfikir, hipotesa, metodologi penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Dalam bab ini akan membahas tentang kebijakan ekonomi Indonesia; kondisi pembangunan infrastruktur maritim Indonesia; kebijakan maritim dan investasi asing Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo; dan kerja sama pembangunan infrastruktur maritim Indonesia dengan Tiongkok.

BAB III

Dalam bab ini akan membahas tentang pertimbangan Presiden Jokowi dalam memilih Tiongkok sebagai mitra kerjasama pada pembangunan infrastruktur maritim yang didalamnya membahas terkait dengan kondisi politik dalam negeri Indonesia, kondisi ekonomi Indonesia, kondisi militer Indonesia, dan konteks internasional.

BAB IV

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan materi penulisan penelitian yang di rangkum dari bab-bab sebelumnya.